

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya yang dapat ditarik adalah implementasi kebijakan PTSL yang dilaksanakan di Kecamatan Gandrungmangu yaitu di desa bulusari, gandrungmanis, dan karanganyar melalui program PTSL sebagai upaya mewujudkan tujuan dari kebijakan PTSL telah berjalan sesuai yang diharapkan meskipun belum optimal. Pada saat yang sama, ini menunjukkan bahwa ternyata implementasi kebijakan pada suatu program sangat penting. Implementasi kebijakan PTSL yang sudah berjalan ditujukan untuk pencapaian tujuan agar BPN Kabupaten Cilacap dapat menjalankan tugasnya di tengah kendala yang ada di masyarakat. Implementasi kebijakan PTSL yang dimaksud dapat dirinci sebagai berikut:

1. Pada aspek jaringan aktor yang terlibat

Hal tersebut menjelaskan siapa saja yang terlibat dalam proses pelayanan dan menanyakan tentang tujuan dari program PTSL, strategi yang dilakukan untuk pencapaian program, aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat maupun pemerintah. Oleh karena itu, setidaknya ada jaringan aktor yang terlibat dalam proses

pelaksanaan program ini terdiri dari adanya ketersediaan organisasi publik ATR/BPN dan ketersediaan organisasi publik pemerintah desa. Dalam hal ini organisasi publik berusaha untuk memberikan program yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang mereka layani. Hal ini bisa meliputi berbagai tindakan yang dilakukan dalam melaksanakan program tersebut kepada masyarakat.

Di BPN Kabupaten Cilacap perwujudan yang dilakukan dalam proses pelaksanaan program yaitu dengan diadakannya penyuluhan kepada desa khususnya di kecamatan gandrungmangu, dengan di adakannya penyuluhan dari BPN membentuk 3 tim satuan tugas untuk terjun ke lapangan melakukan penyuluhan tentang program PTSL, selain itu juga membentuk PULDATAN (Pengumpul data pertanahan) untuk mempermudah pelaksanaan program PTSL. Strategi yang dilakukan organisasi sudah diupayakan untuk pencapaian sebuah program yang sedang diimplementasikan.

Kemudian di Pemerintah desa, perwujudan yang dilakukan dalam proses pelaksanaan program yaitu dengan diadakannya sosialisasi kepada masyarakat dalam hal ini penyampaian terkait pemahaman tentang program PTSL yang sedang dilaksanakan, selain itu dari diadakannya sosialisasi kepada masyarakat dengan hal itu dari keterlibatan tersebut melibatkan kelompok masyarakat

yang mewakili dari masyarakat lain untuk menyampaikan terkait diadakannya sosialisasi, kelompok masyarakat. Hal tersebut untuk mengoptimalkan kebijakan atas ketersediaan sumber daya manusia yang ada. Dalam hal ini organisasi publik berusaha untuk memberikan program yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

2. Tipe kebijakan publik

Dalam hal tersebut didasarkan pada jenis kebijakan publik yang mendorong masyarakat untuk mengerjakan sendiri atau masih melibatkan Pemerintah di tataran rendah. Kebijakan semacam ini bertujuan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat dalam memenuhi kebutuhan mereka sendiri dengan tetap mempertahankan peran pemerintah dalam menyediakan arah, dukungan, dan pengawasan yang diperlukan. Penyelenggaraan kegiatan yang ada di desa diselenggarakan dengan adanya pihak pemerintah desa dalam membantu proses pelaksanaan PTSL, dengan kata lain pemerintah desa melakukan sosialisasi dengan tujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait program PTSL.

Aspek pemahaman masyarakat, sejauh mana masyarakat mengetahui tentang program PTSL yang diselenggarakan oleh pemerintah. Hal ini mencakup pemahaman tentang tujuan program, manfaat yang diharapkan, syarat dan ketentuan partisipasi, serta cara mengakses atau memanfaatkan program PTSL. Pemahaman

masyarakat yang baik tentang program sangat penting karena dapat memengaruhi tingkat partisipasi, efektivitas, dan keberlanjutan program tersebut. Kemudian, dari pemahaman masyarakat cenderung masih kurang karena masih banyak masyarakat yang belum mengetahui program PTSL, dan hal tersebut sangat mempengaruhi partisipasi dan minat masyarakat terhadap program PTSL. Akan tetapi, dengan pemahaman yang masih kurang, masyarakat mendukung program dari pemerintah, karena bagaimanapun masyarakat tetap mendukung kebijakan dari pemerintah disisi lain program PTSL ini diperuntukan untuk masyarakat.

3. Kebijakan dibuat sesuai dengan harapan, keinginan publik terhadap program PTSL

Kebijakan publik merupakan salah satu program yang menyertakan sarana dan prasana dibuat oleh organisasi publik yang membutuhkan penerapan dan tujuan ke khalayak dengan mempertimbangkan berbagai hal yang menghambat dan mendukung. Kebijakan yang dibuat sesuai dengan harapan dan keinginan publik terhadap program mengacu pada proses pembuatan kebijakan yang memperhitungkan aspirasi, kebutuhan, dan preferensi masyarakat yang menjadi sasaran atau penerima dari program tersebut. Dalam hal ini penting bahwa tidak selalu

mungkin atau praktis untuk memenuhi semua harapan atau keinginan masyarakat dalam setiap kebijakan.

Dengan demikian, program PTSL dari masyarakat sebagai sasaran kebijakan merasakan perbedaan yaitu yang sudah bersertifikat dan yang belum sertifikat, dari masyarakat memiliki harapan untuk dikemudian hari bisa terhindar dari konflik sengketa tanah, selain itu jika dikemudian hari terjadi kepentingan mendesak sertifikat tersebut bisa dijadikan sebagai agunan, kemudian dari pajak juga bisa sesuai baik di SPPT maupun sertifikat.

Kemudian, kesesuaian kebijakan terhadap keinginan masyarakat itu sendiri mengalami sebuah keinginan untuk mengikuti program tersebut tetapi dari keinginan tersebut belum bisa ikut serta karena terdapat beberapa kendala administrasi yang dialami masyarakat yaitu tanah yang dimiliki masih dalam hak waris, sengketa tanah, dan kesadaran masyarakat yang kurang peduli terhadap program PTSL. Sehingga tersebut menjadi faktor kendala yang dirasakan masyarakat karena faktor keberhasilan dari program PTSL yaitu kelancaran administrasi.

5.2. Implikasi

Berdasarkan kesimpulan mengenai implementasi kebijakan PTSL yang dilakukan di Kecamatan Gandrungmangu dalam percepatan program PTSL sebagai upaya mewujudkan tujuan program PTSL, implikasi dapat dilakukan adalah:

1. Secara umum, sebagai organisasi publik dalam mengoptimalkan program khususnya di masyarakat, BPN Kabupaten Cilacap diharapkan mampu mengoptimalkan pelaksanaan program PTSL. Kemampuan mengoptimalkan tersebut dapat mempengaruhi sebuah keberhasilan dari suatu program yang sedang diimplementasikan.
2. Dalam aspek jaringan aktor yang terlibat, upaya dalam keterlibatan baik dari pihak BPN, Pemerintah Desa, dan masyarakat yang ada harus diperhatikan untuk mencapai tujuan kebijakan PTSL dengan memaksimalkan pelaksanaan hubungan kepada masyarakat yang terjalin, strategi yang dilakukan dalam upaya untuk pencapaian program yang sedang diimplementasikan.
3. Dalam aspek tipe kebijakan publik yang mendorong masyarakat mengerjakan sendiri atau masih melibatkan pemerintah di tataran rendah, dalam hal ini dari pihak BPN maupun Pemerintah Desa harus bisa memberikan sebuah pemahaman secara jelas agar dapat dipahami oleh masyarakat, dengan demikian adanya pemahaman yang disampaikan akan mendorong masyarakat untuk mengikuti program PTSL dan dukungan dari masyarakat akan pentingnya kebijakan tersebut. Hal tersebut akan mempengaruhi minat dari masyarakat itu sendiri.

4. Dalam aspek kebijakan dibuat sesuai dengan harapan, keinginan publik terhadap program PTSL. PTSL diperuntukan untuk masyarakat yang belum mendaftarkan bidang tanahnya, dengan adanya program tersebut masyarakat dimudahkan untuk mengurus dalam proses pembuatan sertifikat, akan tetapi masyarakat memiliki sebuah keinginan untuk mendaftar namun masih terhalang oleh kendala yang dialami dan kendala tersebut yang menghambat untuk mendaftar program PTSL. Kemudian dari keinginan tersebut masyarakat berharap bahwa dikemudian hari jika ada hal yang mendesak dengan memiliki sertifikat akan bermanfaat bagi kebutuhannya.

